

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KAIN SUTERA DI DESA PAKKANNA**



Disusun Oleh :

NURFITRIA ANUGRAH

Nomor Induk Mahasiswa : 105641104020

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KAIN SUTERA DI DESA PAKKANNA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Strata Satu (S1)

Sarjana Ilmu Politik (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

NURFITRIA ANUGRAH

Nomor Induk Mahasiswa : 105641104020

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Kabupaten Wajo Dalam
Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Kain Sutera di Desa Pakkanna.

Nama Mahasiswa : Nurfitria Anugrah

No. Stambuk/NIM : 105641104020

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nuryani Mustari, S.IP., M.Si


Dr. Muhammad Yahya, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor : 0244/FSP/A.4-II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.IP) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Makassar pada hari Selasa 27 Februari 2024.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727


Dr. Andi Lubar Prianto, S.IP., M.Si

NBM. 999797

Tim Penguji :

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
3. Dr. Muhammad Yahya, M.si

)
)
)

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : NURFITRIA ANUGRAH

No. Stambuk/Nim : 105641104020

Tempat Tanggal Lahir : Atapange, 31 Agustus 2001

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Strategi Pemerintah Kabupaten Wajo Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kain Sutera Di Pakkanna”** adalah penelitian yang saya buat sendiri. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 4 Maret 2024

Yang menyatakan

Nurfitria Anugrah

ABSTRAK

Nurfitria Anugrah, Strategi Pemerintah Kabupaten Wajo Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kain Sutera Di Desa Pakkanna (dibimbing oleh Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.S.i dan Dr. Muhammad Yahya, M,Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kain sutera di Desa Pakkanna. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memaksimalkan pengembangan UMKM kain sutera Di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo. Dalam hal tersebut, peran pemerintah sebagai stabilisator yaitu untuk menjaga stabilitas UMKM kain sutera. Sebagai innovator juga memiliki peran untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru pada agar dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. Sebagai modernisator, pemerintah mengarahkan masyarakat menuju modernisasi, pemerintah memberikan suatu pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kualitas mutu produk. Sebagai pelopor pemerintah berperan sebagai perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan. Sehingga mampu menunjukkan contoh nyata dan mendorong semangat masyarakat melalui tindakan yang bermanfaat. Dengan tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan maksimal, sehingga pengrajin dan kelompok UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo bisa berkembang dan dikenal di dunia global.

Kata Kunci : Stabilisator, Innovator, Modernisator, Pelopor.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keberkahan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Pemerintah Kabupaten Wajo Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kain Sutera di Desa Pakkanna”**. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan shawat kepada Baginda Rasulullah SAW. Sosok suri tauladan bagi kita semua Ummat Islam di muka bumi ini. Dan semoga kebahagiaan selalu tercurahkan kepada keluarga, sahabat dan umatnya.

Penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis Menyadari bahwa penyusunan proposal penelitian ini tidak akan terwujud tanda adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, demi kesempatan ini, saran dan kritik yang sifat membangun. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berbagai pihak yang membutuhkan.

1. Kepada Bapak Muhammad Ridwan, S.Pd dan Ibu Hj. Suriani yang saya hormati selaku orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat mendidik serta memberikan pendidikan sampai sekarang. Mendoakan dan memberikan support untuk saya. Tak lupa

kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi saya tepat pada 2 tahun 6 bulan.

2. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M. Ag. Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S, Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Bapak Ahmad Harakan, S. IP., M.H.I selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang sangat berjasa serta memberikan semangat pada saat proses pengajuan skripsi sampai selesai.
5. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing I saya dan Bapak Muhammad Yahya, M.Si selaku pembimbing II saya, yang sudah membimbing saya pada saat proses bimbingan skripsi sampai ketahap Yudisium yang tak hentinya memberikan semangat dan menjadi motivator dalam menyelesaikan skripsi saya.
6. Seluruh jajaran Bapak dan Ibu dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Teman teman Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang saya banggakan.
8. Terhusus sahabat sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan membantu saya pada saat proses penyelesaian skripsi saya ucapkan banyak terimah kasih.

9. Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM kabupaten Wajo yang telah membantu, mengarahakan dan membimbing saya pada saat penelitian skripsi.

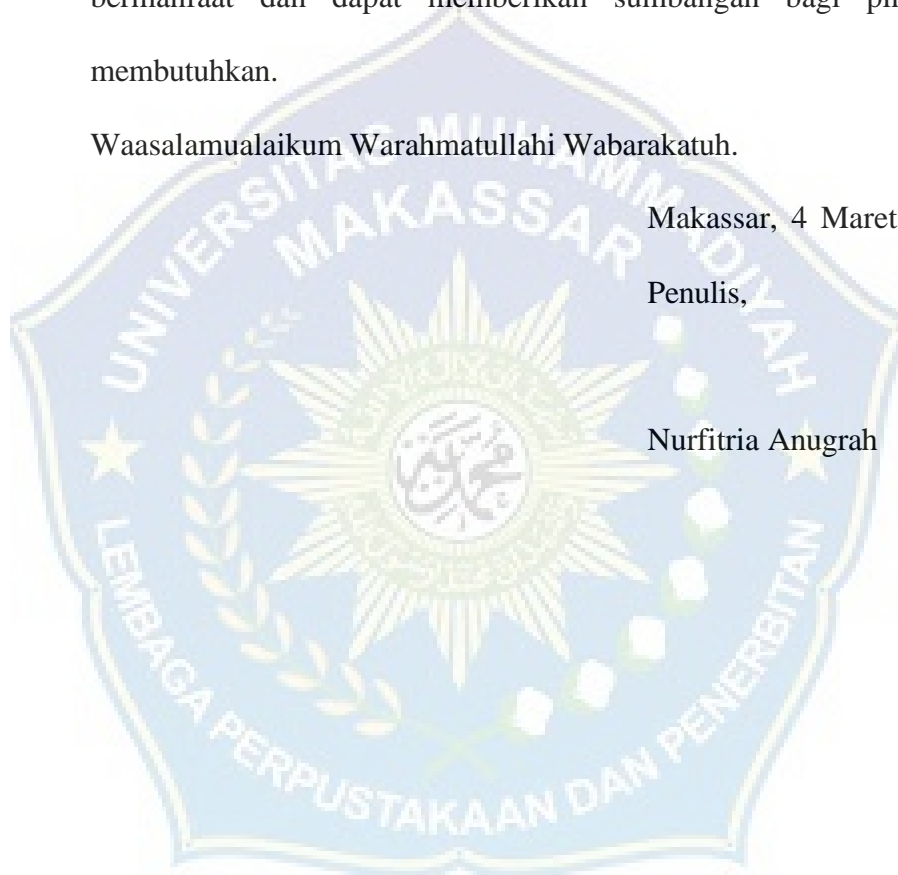
Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun yang sangat diharapkan, semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi pihak yang membutuhkan.

Waasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 4 Maret 2024

Penulis,

Nurfitria Anugrah



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Kegunaan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Teori dan Konsep	13
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Objek Penelitian	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77
RIWAYAT HIDUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama masyarakat dan pemerintah. Situasi masyarakat umum berfungsi sebagai pembangun utama, dan pemerintah berkomitmen kuat untuk memberikan bantuan dan bantuan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyelamatan UMKM (Sugiri, 2020).

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pérez, 2017).

UMKM merupakan penggerak perekonomian masyarakat yang memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat (Yusnita et al., 2022). Menurut UU No. 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang per-orangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.

Usaha kecil, yaitu usaha yang ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau besar dengan kriteria tertentu . Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar (Hamza & Agustien, 2019).

Pemberdayaan UMKM melalui pengurus dan anggotanya merupakan hal yang sangat penting guna menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Tahun 2015 (Dewi et al., 2021). Tingginya populasi usia produktif di Indonesia tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat Indonesia berlomba-lomba menciptakan terobosan untuk meningkatkan persaingan demi memajukan sektor prekomunian. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan dan mendorong pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah Daerah dalam

pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya (Salam & Prathama, 2022).

Dalam perspektif dunia, telah diakui bahwa peran UMKM sangat penting dalam pemebangunan serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkembang di suatu Negara. UMKM sangat penting karena tidak hanya kelompok usaha mendominasi operasi unit. Menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan Usaha Besar (UB), juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB *Expor*, Devisa, dan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan.

Dengan demikian, UMKM memiliki peran strategis dalam prekomunian Indonesia. UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan-permasalahan, seperti : pemasaran, modal atau pembiayaan, bahan baku, teknologi, SDM, kewirusahaan, manajemen, birokrasi dan infrastruktur, kemitraan, serta UMKM dituntut untuk memiliki daya saing.

Dengan megikuti perubahan UMKM akan tidak mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing tanpa keterlibatkan semua pihak. Pihak utama yang terlibat dalam hal tersebut adalah pemerintah melalui kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, serta membutuhkan strategi dalam pengembangannya, membutuhkan penerapan Digital Marketing serta model bisnis yang sesuai bagi kebutuhan UMKM agar dapat berkembang dan tercapainya daya saing UMKM baik nasional maupun global.

UMKM di Indonesia mempunyai kontribusi yang penting sebagai penopang prekomunian. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil usaha sebagai penggerak aktivitas ekonomi nasional. UMKM juga memiliki potensi yang begitu besar bagi peningkatan prekomunian rakyat. Namun, kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal dan lain-lain.

Regulasi Pemerintah yang diperlukan untuk memberikan peluang berkembangnya UMKM di pedesaan meliputi dengan adanya pemeberian sarana dan prasarana, pembinaan, serta pengembangan jaringan usaha untuk mendukung eksistensi masyarakat menghadapi persaingan ekonomi. Indonesia yang terdiri dari 72.000 desa memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan UMKM sebagai salah satu faktor utama pendorong perkembangan ekonomi Indonesia di tengah pesatnya arus globalisasi sehingga harus menghadapi tantangan global.

Maka dari itu Kelompok Wirausahawan Desa (*Entrepreneurs Village*) sebagai potret pengembangan UMKM sebagai suatu solusi dari sistem prekomunian. Menurut Gede Geva (2009:15-18) dalam pengembangan UMKM peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, katalisator.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan.

Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan. Peran pemerintah dalam sebagai regulator adalah membuat suatu kebijakan agar mempermudah dalam pengembangan usaha UMKM. Pemerintah juga berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha agar tetap kondusif.

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah pengembangan UMKM dalam mempercepat proses berkembangnya. Pemerintah menjalankan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas atau kelompok dan Lembaga masyarakat yang mendukung antara lain adalah : Karang Taruna, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) (Mustari et al., 2021) untuk memproduktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual (perlindungan hak dan kekayaan intelektual), serta pemberian modal.

Salah satu bagian dari UMKM di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu usaha kecil, industri tenun sutera yang biasa disebut Kain Suterayang merupakan sektor yang dominan diantara industri lainnya. Data awal, terdapat sekitar 50 UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. Namun, angka ini dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan data terkini.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan industri sutera yang terbesar di Indonesia, sementara Kabupaten Wajo memiliki unit usaha tenun terbanyak di antara kabupaten lainnya. Industri tersebut masih berupa usaha rumah

tangga (*home industry*). Indonesia adalah Negara yang kaya akan produk-produk yang bersaing di pasar internasional. Salah satunya adalah Kain Sutra. Kain Sutra yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Wajo.

Kabupaten Wajo yang mempunyai julukan sebagai “Kota Sutra” merupakan industri rumah tangga yang bertumbuh kembang dan berevolusi yang terlanjur menguasai hajat hidup sebagian besar masyarakat di Kabupaten Wajo. Pekerjaan ini telah ditekuni oleh masyarakat secara turun temurun, yang dilakukan dengan menggunakan alat yang masih sederhana.

Pemasaran yang terbesar di seluruh Indonesia yang dikenal dengan nama sarung bugis dan kain ikat bugis. Secara garis besar, peralatan yang digunakan oleh industri tenun ini adalah walida (*gendongan*) yang menghasilkan sarung sutera. Dimasa lampau, kain sutera hanya di buat untuk acara atau keperluan pribadi. Kain ini biasa digunakan untuk menghadiri acara pernikahan, dan digunakan pada saat hari raya lebaran dan masih berlangsung sampai sekarang.

Kain tenun sutera Sulawesi Selatan, disebut juga dengan *Lipa’Sabbe* yang dalam bahasa Bugis, *Lipa’* berarti sarung dan *Sabbe* Berarti Sutra. Pada umumnya proses pembuatan benang sutera menjadi kain sutera masih menggunakan alat tenun yang tradisional, yang biasa disebut dengan *gendongan*. Ada 2 jenis sutera yang ada di Sulawesi Selatan yang sangat terkenal, kain sutera Bugis-Sengkang yang berasal dari suku Bugis, dan kain Sutra Mandar, yang berasal dari suku Mandar. Untuk menghasilkan sarung

sutera. Pengrajin memelihara ulat yang disebut dengan ulat sutera Cina dan ulat sutera Jepang, sehingga hasil tenun sutera lebih halus, mengkilat dan lebih tahan lama.

Kain tenun Sengkang hadir dengan beragam motif yang khas. Mulai dari cobo, makkalu, balo tettong, balo renni, ukiran Toraja, dan aksara Bugis. Aneka motif ini tentunya dirangkai menggunakan benang sutera dengan warna yang cukup mencolok. Tentunya, warna tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Warna tersebut biasa digunakan untuk membedakan apakah si pemakai kain tenun Sengkang merupakan perempuan yang ingin menikah (Puspasari et al., 2022).

Kecamatan Tanasitolo, tepat di Desa Pakkanna merupakan salah satu daerah pengrajin kain sutera yang ada di Kabupaten Wajo. Dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai penenun kain sutera. Dalam melakukan produksi, pengusaha terkadang mendapatkan kendala dalam memproduksi kain sutera. Berdasarkan hasil pengamatan, yang dapat diidentifikasi yaitu terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pengrajin dalam mengkreasikan motif, adanya keterbatasan modal, serta kesulitan dalam pemasaran produk.

Keterbatasan mengenai modal usaha merupakan masalah umum yang dihadapi oleh banyaknya UMKM, termasuk UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. Modal usaha yang terbatas dapat membatasi kemampuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas produk, atau melakukan inovasi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan

pemasaran. Hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan usaha serta mengurangi daya saing UMKM pada saat produksi.

Kurangnya pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha, desain produk, teknik produksi, pengelolaan keuangan dan pemasaran dapat menghambat usaha yang sukses. Tanpa pengetahuan yang memadai, UMKM sulit untuk mengembangkan strategi yang efektif, meningkatkan kualitas produk, memasuki pasar yang lebih luas, atau menciptakan peluang yang baru.

Kesulitan dalam pemasaran produk, UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo mungkin menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk. Kurangnya akses dalam pemasaran dan ketidakmampuan untuk mencapai pelanggan potensial secara efektif dapat menjadi suatu hambatan dalam pemasaran produk. Pertenunan di kota yang dikenal sebagai julukan “Kota Sutera” merupakan suatu usaha industri rumah tangga (*home industry*) yang bertumbuh kembang dan berevolusi secara massif yang terlanjur menguasai hajat hidup masyarakat di Kabupaten Wajo. Pekerjaan ini telah ditekuni oleh masyarakat secara turun-temurun yang dilakukan dengan menggunakan alat yang masih sederhana. Namun, pemasaran yang terbesar dan dikenal di seluruh Indonesia dikenal dengan nama sarung Bugis atau sarung sutera.

Dilihat dari besarnya sumbangan masyarakat industri rumah tangga pertenunan, pada dasarnya Kabupaten Wajo mempunyai peluang yang besar

untuk berkembang. Maka dengan itu, perkembangan industri penenun diharapkan dapat memiliki peran yang akan menjadi media dalam pengetasan kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain suteradi Kabupaten Wajo?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mengembangkan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi dan perbaikan dalam mengembangkan penelitian yang dilakukan selanjutnya tentang strategi Pemerintah kabupaten Wajo dalam pengembangan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna.
2. Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah
 - a. Memerikan informasi yang spesifik tentang pengembangan UMKM kain Sutera di Kabupaten Wajo, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor usaha tersebut.
 - b. Menyediakan dasar pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang potensi dan peluang pengembangan UMKM kain Sutera di Kabupaten Wajo, Sehingga pemerintah dapat merancang kebijakan yang berfokus pada pengembangan sektor ini dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat setempat.
 - c. Melakukan analisis terhadap keberlanjutan UMKM kain Sutera di Kabupten Wajo, termasuk aspek keuangan, pemasaran, manajemen, dan pengembangan produk, sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan yang tepat dalam memastikan kelangsungan UMKM tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi dalam suatu penelitian sebagai pembeda maupun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu. *VOSviewer* adalah alat perangkat lunak untuk membuat, menjelajahi, dan memvisualisasikan peta jaringan metadata. Dapat disimpulkan bahwa perangkat ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu pertama membuat bibliometrik berdasarkan jaringan metadata. Peta tersebut dapat membuat jaringan publikasi ilmiah, jurnal, peneliti, institusi, negara dan kata yang sudah tersedia. Kedua memvisualisasikan dan menjelajahi peta bibliometrik. Bibliometrik merupakan bagian analisis terhadap buku, artikel, dan jurnal.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu,

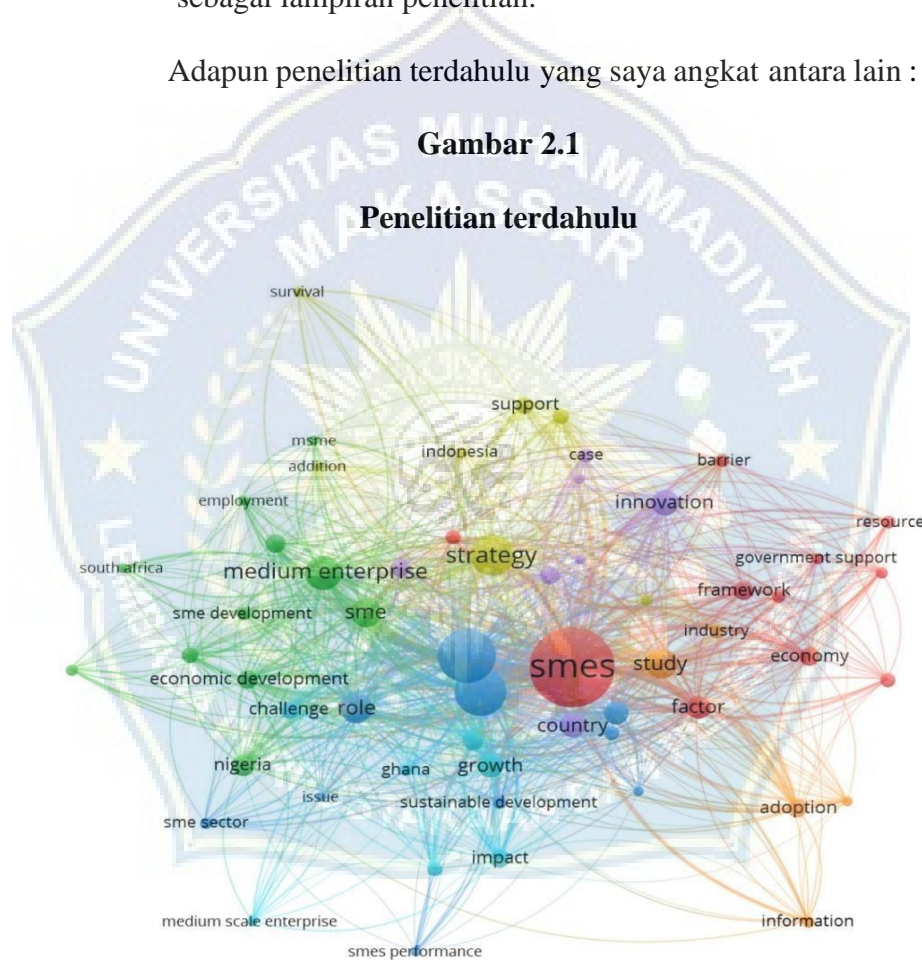
1. Ruang lingkup perkembangan UMKM : Penelitian sebelumnya telah melihat perkembangan UMKM di kabupaten Wajo, tanpa memfokuskan industri kain sutera. Sementara itu, penelitian ini fokus pada pengembangan UMKM kain sutera.
2. Tujuan penelitian : Tujuan penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui eksplorasi tentang perkembangan UMKM. Namun, penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera.

3. Metode penelitian : Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, berdasarkan tentang survey statistic untuk mendapatkan data umum. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
4. Berdasarkan tentang hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai lampiran penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang saya angkat antara lain :

Gambar 2.1

Penelitian terdahulu



Sumber hasil analisis dari VOSviewer 2023

Pada gambar tersebut merupakan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan publish or perish ditemukan sebanyak 100 artikel jurnal dengan rentan waktu 2013-2023 yang berkaitan erat dengan kata kunci

strategi pemerintah, pengembangan, dan UMKM. Artikel tersebut kemudian dikelola menggunakan *VOSviewer* untuk menentukan posisi posisi penelitian. Artikel tersebut kemudian dianalisis dan dimasukkan kedalam aplikasi *VOSviewer*. Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan yang membahas tentang UMKM, *home industry* guna untuk mendukung peningkatan wirausaha masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

Menurut Sugiyono dalam (Isnani Sara Aprili, Eka Supriatna dan Andika Triansyah, 2020:3) Metode penelitian pengembangan adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Lain halnya, untuk menghasilkan produk tertentudiperlukan analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut (Engel, 2017).

Menurut Pranadjaja (2003) Gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa “Istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah (Puspasari et al., 2022). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak- hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan (Nirwana et al., 2017).

Pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo melalui

perspektif strategi pemerintah akan dikaji melalui konsep yang relevan dengan fokus yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji konsep yang relevan sebagai berikut :

1) Pengembangan UMKM

Berikut ini merupakan pembahasan dengan menggunakan landasan teori Febriantoro (2018) yang meliputi 4 faktor utama, yaitu antara lain peran pemerintah sebagai Stabilisator, Inovator, modernisator, dan juga pelopor (Febriantoro, 2018).

1) Peran pemerintah sebagai stabilisator

Peran Pemerintah Daerah sebagai stabilisator memiliki peran untuk menjaga stabilitas iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memerlukan usaha iklim agar tetap stabil dan dapat semakin maju dan berkembang (Chalim et al.,2022). Salah satu cara agar tetap stabil ialah dengan memberikan berbagai bantuan modal usaha untuk para pelaku UMKM. Menurut (Amalia, 2018) mengemukakan bahwa komponen utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang efektif adalah dengan adanya bantuan modal.

Bantuan modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan para pelaku usaha (Wirawan et al., 2015). Tanpa adanya bantuan modal usaha, maka akan mengalami kesulitan dalam proses pengembangan usaha dalam upaya peningkatan pendapatan. Peran pemerintah selaku stabilisator menjadi sebuah hal penting

dalam pengembangan suatu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah yang memiliki peran sebagai stabilisator harus mampu memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku UMKM. Peran Pemerintah Daerah sebagai stabilisator menjadi sebuah hal penting dalam pengembangan UMKM.

2) Peran Pemerintah Sebagai Inovator

Pemerintah Daerah selaku inovator memiliki peran untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal yang baru pada suatu UMKM agar UMKM dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. Peran inovator menjadi peran yang sangat penting untuk menunjang kemajuan dari UMKM. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Wajo harus mampu berinovasi untuk menciptakan ide atau gagasan baru untuk dikembangkan menjadi lebih berdaya guna dan memiliki nilai manfaat yang tinggi agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain sutera di Kabupaten Wajo dapat berkembang lebih pesat.

3) Peran Pemerintah Sebagai Modernisator

Pemerintah Daerah yang bertugas dalam mengarahkan masyarakat menuju modernisasi dan meninggalkan pemikiran yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan modern agar masyarakat dapat semakin maju dan berkembang. Pemerintah Daerah harus melakukan kebijakan agar pemikiran pelaku UMKM dapat terus meningkat dan

terbaharui dan dapat terus mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah Daerah selaku modernisator perlu melakukan dan memberikan suatu pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia agar dapat ingatkan pengetahuan, keterampilan serta kualitas mutu produk.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 1 dinyatakan bahwa perkembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Menurut Syfa et al (2021) bimbingan pelatihan bagi para pelaku UMKM merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh tenaga profesional pelatihan dalam waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kinerja pelaku usaha dalam bidang tertentu guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas usaha.

4) Peran Pemerintah Sebagai Pelopor

Pemerintah Daerah selaku pelopor tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang mampu menunjukkan contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk

mengikuti melalui tindakan nyata jika memang hal tersebut bermanfaat. Sebagai pelopor, Pemerintah daerah juga memiliki peran yang mampu mendorong semangat masyarakat untuk melakukan hal positif yang berdampak kepada UMKM tersebut.

Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara berkomunikasi masyarakat namun juga metode perdagangannya. Pertumbuhan *e-commerce* yang semakin banyak berguna menjadi tempat jual beli barang secara online yang bisa digunakan oleh pengusaha. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dimana *marketplace* untuk UMKM dimanfaatkan oleh pemilik usaha kecil menengah. Selama ini kendala yang selalu dihadapi oleh UMKM adalah masalah pemasaran. Dengan adanya *e-commerce* merupakan peluang bagi UMKM, karena dengan menggunakan pemasaran memungkinkan UMKM akan lebih luas dan promosi lebih murah (Mukhsin, 2019).

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Wajo dapat mendorong pengembangan UMKM kain sutera, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2) **Konsep Strategi Pengembangan Pemerintah**

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa konsep strategi dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di

Indonesia. Antara lain :

a. Peningkatan Akses Modal

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Sehingga pemerintah menyediakan berbagai macam pendanaan dan pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), modal ventura, dan pinjaman micro. Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan untuk memperluas akses modal bagi UMKM.

b. Pemberian Pelatihan Dan Pendampingan

Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengusaha UMKM, baik dalam hal manajemen, pemasaran, produksi, hingga peningkatan kualitas produk. Pelatihan dan pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat keunggulan kompetitif UMKM dan daya saing di pasar.

c. Meningkatkan Akses Pasar

Pemerintah mendorong UMKM untuk meningkatkan akses ke pasar lokal, regional, dan global. Hal ini dilakukan untuk pelatihan pemasaran, pemasaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta promosi produk UMKM.

d. Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan UMKM. Seperti pengembangan kawasan industry, pusat logistic, serta jaringan distribusi yang efisien. Infrastruktur yang baik dapat mempermudah akses bahan baku, transportasi, dan

distribusi produk UMKM.

e. Simplifikasi Regulasi Dan Birokrasi

Pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi dan birokrasi yang terkait dengan UMKM, seperti perisinan usaha, perpajakan, dan ekspor import. Tujuan dari upaya ini adalah mempermudah proses administrasi dan mengurangi beban biaya operasional bagi UMKM.

f. Peningkatan Teknologi Dan Inovasi

Pemerintah mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi dan inovasi dalam produksi dan manajemen dalam usaha. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai macam program penelitian dan pengembangan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam penerapan teknologi.

g. Peningkatan Jaringan Dan Kerjasama

Pemerintah telah mendorong UMKM dalam menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, pusat riset dan lembaga ekonomi. Kerjasama ini meningkatkan akses pengetahuan yang lebih luas. Tujuan dari konsep strategi ini adalah untuk meningkatkan suatu pertumbuhan dan daya saing UMKM, serta dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM). Dengan adanya bantuan fasilitas, melakukan pembimbingan dan pendampingan, serta bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002. Menjelaskan tentang pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau untuk menghasilkan teknologi yang baru.

Menurut Setyosari (2016:277) pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan mengevaluasi produk pendidikan. Sedangkan menurut Sugiono (2008:297) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.

Menurut Iskandar Wiyokusumo dalam Afrilianasari (Eunika Awalla, Femmy M.G Tulus dan Alden Laloma, 2018). Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar

kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan keadaan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terarah dan terencana untuk membuat dan memperbaiki sehingga menjadi produk yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas mutu yang lebih baik.

3) Fungsi Dan Tugas Pemerintah

Menurut Taliziduhu (2011:89) dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia perlu bekerjasama, dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol aktivitas dalam mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama

warga masyarakat.

Rewansyah dalam Akbar (2016, 19-21) mengungkapkan bahwa secara umum pemerintah memiliki 5 fungsi utama peranan pemerintah yaitu :

1. Fungsi Pengaturan/Regulasi

Fungsi pengaturan atau regulasi yang artinya sebagai penetapan kebijakan publik/Negara. Fungsi ini tidak dapat dipindahkan ataupun didelegasikan kepada organisasi atau lembaga diluar pemerintahan. Kebijakan pemerintah Negara dirumuskan secara tertulis dengan mengikuti suatu aturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan pemegang kedaulatan rakyat.

2. Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat bertujuan untuk menjaga kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, memberikan perlindungan dan keamanan, serta ketertiban dan keadilan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Ryass dalam buku makna pemerintahan itu tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan dalam Rivai (2010:27), ada 3 fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*).

3. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi, pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam mengatasi kehidupan. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan.

4. Fungsi Pengelolaan Aset/Kekayaan Negara

Aset atau kekayaan Negara merupakan sumber daya yang terdapat di bumi Indonesia yang dikelola atau diurus pemerintah. Menurut Fahmi (2011:113) pengelolaan sumber daya merupakan penataan barang- barang, baik yang mempunyai manfaat lebih dari setahun (inventaris) maupun barang pakai habis yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, pengadaan, penerimaan/penyimpangan, pendistribusian, pemeliharaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

5. Fungsi Keamanan

Fungsi pemerintah dibidang pertahanan, keamanan, ketertiban umum, dan pengamanan serta perumusan kebijakan (pengaturan), pelayanan publik, pemberdayaan dan fungsi pengelolaan aset Negara.

Rasyid dalam Nurwana (2003:13), secara umum tugas-tugas pemerintah yaitu :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan antara masyarakat, mejamin akan perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga dan non pemerintahan atau yang akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melalukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonmi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti, air, tanah dan hutan.

4) Strategi Pemerintah Kabupaten Wajo dalam Pengembangan

UMKM Kain Sutera

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2014 yang berbunyi pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya sesuai dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab serta berperan besar dalam mengurus urusan pemerintahannya, termasuk pembangunan ekonomi. Salah kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat.

Strategi pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain sutera di Kabupaten Wajo antara lain :

a. Peningkatan Ekonomi Lokal

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain sutera di Kabupaten Wajo bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Yakni dengan memberikan dukungan kepada masyarakat pengrajin kain sutera. Pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperluas pemasaran, meningkatkan penghasilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

b. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain sutera. Pemerintah memberikan modal, palatihan, dan akses pemasaran. Pemerintah berharap pengusaha kain sutera dapat lebih dikembangkan melalui bisnis yang baik. Dan meningkatkan kualitas dan inovasi produk.

c. Pemajuan Industri Lokal

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain sutera dapat menjadi strategi pemerintah untuk memajukan industri lokal di Kabupaten Wajo. Pemerintah berharap penguatan investasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi. Serta menciptakan produk yang berkualitas yang dapat bersaing baik di tingkat regional maupun nasional.

d. Promosi Kebudayaan Lokal

Kain sutera merupakan produk khas dari kabupaten Wajo yang memiliki nilai budaya danjarah yang tinggi. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain sutera juga dapat menjadi strategi pemerintah untuk mempromosikan kebudayaan lokal serta menjaga tradisi turun menuru. Dengan mengembangkan UMKM ini, pemerintah berharap dapat lebih memperkenalkan keindahan dan keunikan kain sutera Kabupaten Wajo kepada masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) kain sutera, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya, seperti memberikan pelatihan kepada pengusaha kain sutera, memberikan akses keperluan produksi, membantu dalam pemasaran produk, mengkoordinasikan kerja sama dengan pihak terkait, serta menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo.

5) Tahapan Pengembangan UMKM

Pengembangan industri kreatif pada UMKM sangat penting dilakukan karena mempunyai peran besar dalam pembangunan ekonomi terbukti memberikan kontribusi cukup besar dan mampu mengatasi pengaguran (Rindrayani, 2017).

Menurut David Mc Clelland tahapan pengembangan UMKM, di antaranya :

Menengah (UMKM) yang memahami kebutuhan pelanggannya, memiliki sumber dayan yang cukup untuk memenuhi permintaan dan mampu menghadapi persaingan pasar.

- a. Tahap keterampilan (*skill stage*) : UMKM yang mengembangkan keterampilan manajerial, pemasaran, keuangan, dan operasional agar dapat bertahan dan berkembang.
- b. Tahap tahan banting (*resistance stage*) : UMKM yang dapat mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan

bisnis.

- c. Tahap pertumbuhan (*growth stage*) : UMKM yang berhasil memperluas pasar, meningkatkan penjualan dan mengembangkan produk atau jasa yang lebih inovatif.

6) Faktor yang Mempengaruhi Kelangsungan Pengembangan UMKM

Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain sutera di Kabupaten Wajo.

a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dapat mendukung kelangsungan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo antara lain :

- 1) Potensi bahan baku : Kabupaten Wajo memiliki potensi alam yang cukup baik untuk produksi sutera. Seperti tanaman murbei, tanaman ini merupakan makanan utama ulat sutera . keberadaan bahan baku ini yang akan memadai pengembangan UMKM kain sutera.
- 2) Keterampilan tenaga kerja : Kabupaten Wajo telah memiliki sejumlah UMKM kain sutera yang telah berpengalaman dalam menghasilkan produk berkualitas. Keahlian tenaga kerja dalam proses pembuatan kain sutera memiliki motif yang khas sutera Wajo, yang telah diwariskan secara turun

temurun, sebagai dukungan penting bagi pengembangan UMKM kain sutera.

- 3) Pemasaran dan promosi : Promosi dan pemasaran yang efektif dapat meningkatkan penjualan dan pengenalan kain sutera Wajo kepada masyarakat luar. Dukungan Pemerintah Daerah dalam mempromosikan produk lokal ini menjadi faktor yang penting bagi perkembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo.
- 4) Infrastruktur : Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan bagus, tersedianya akses sumber daya energi dan sarana transportasi yang memadai, hal tersebut akan mendukung proses produksi produk dan distribusi produk kain sutera Wajo.

b) Faktor Penghambat

Sementara itu, adapun faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kelangsungan pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo antara lain :

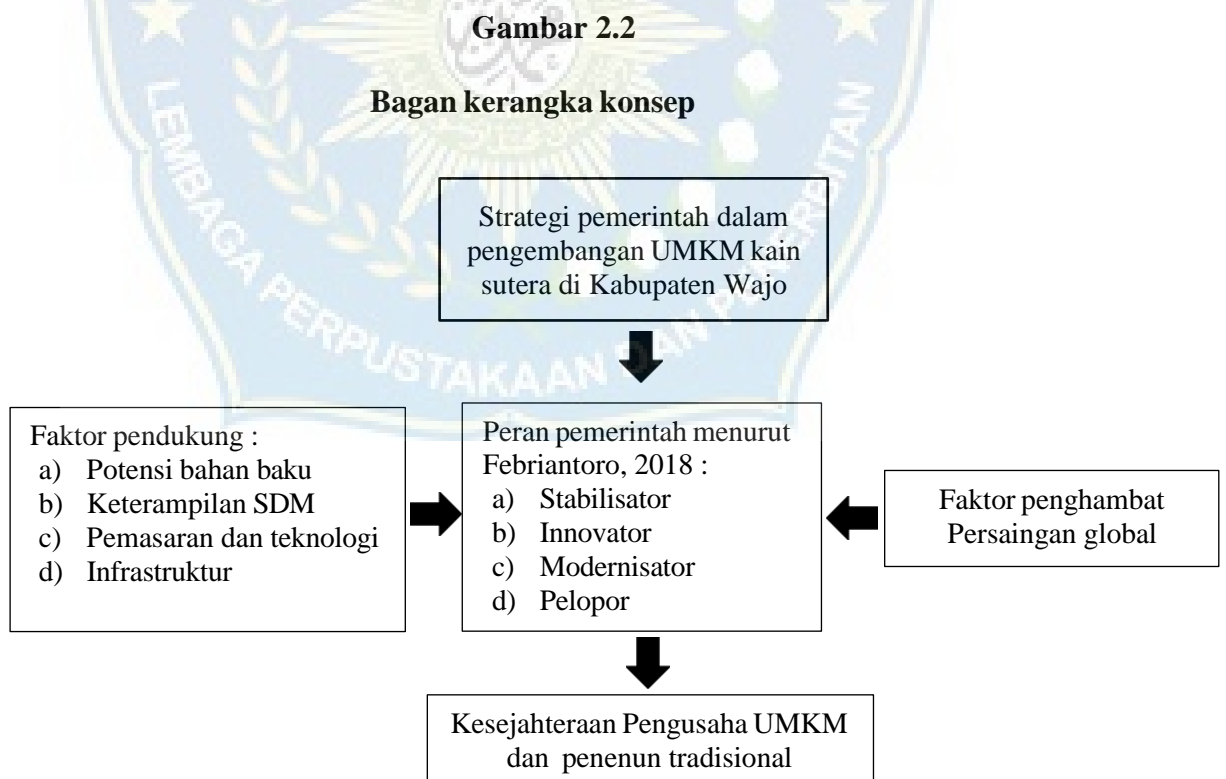
1. Persaingan global : Kehadiran produk kain sutera import yang lebih murah dan mudah di akses dapat menjadi faktor penghambat bagi UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. Persaingan tersebut dapat mengancam kelangsungan pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo.
2. Perubahan gaya hidup dan permintaan pasar : Perubahan gaya hidup dan selera pasar yang berubah dapat

mempengaruhi permintaan calon konsumen kain sutera. Jika UMKM tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, maka akan mengalami kesulitan berkembang di masa yang akan datang.

Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dari Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat untuk mengatasi faktor penghambat dan memaksimalkan faktor pendukung dalam pengembangan UMKM kainsutera di Kabupaten Wajo.

C. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut :



D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan pengembangan pertumbuhan UMKM di Indonesia (Suci, 2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan beberapa data sekunder dari lembaga penelitian dan beberapa tulisan atau jurnal terdahulu. Peneliti mengumpulkan, mengkaji dan mendeskripsikan data mengenai sektor UMKM, peran inovasi sosial dan memahami konsep pemberdayaan dari berbagai sudut pandang dengan berbagai pendekatan, dianalisis secara deskriptif, menggunakan analisa atau interpretasi mengenai gambaran dan objek yang terkait dengan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional (Ibrahim, 2022).

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain sutra di Desa Pakkanna Kabupaten Wajo, tepatnya di Kecamatan Tanasitolo. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana langkah-langkah yang diambil dan kebijakan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Wajo untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM kain sutera terutama di Kecamatan Tanasitolo. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mendukung perkembangan industri Kain Sutera, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wajo.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Kabupaten Wajo terkenal sebagai salah satu daerah penghasil Kain Sutra yang sangat berkualitas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam mengembangkan industri UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo.

Deskripsi fokus penelitian yang dimaksud adalah strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain Sutra di kabupaten Wajo, antara lain yaitu :

1. Koordinator adalah Pemerintah Daerah sebagai koordinator dalam usaha kain sutera
2. Fasilitator adalah Pemerintah Daerah sebagai fasilitator yaitu pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat penun sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas.
3. Stimulator adalah Pemerintah Daerah berperan dalam pengembangan usaha, agar masyarakat bisa mempertahankan serta menumbuh kembangkan investor yang telah ada. Seperti pembuatan brosur, membuka lapangan pekerja kain tenun, dan sebagainya.
4. Kebijakan Dan Regulasi
 - a) Menganalisis kebijakan dan regualsi yang diterapkan pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo.
 - b) Melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan

stimulant kepada UMKM kain sutera dalam meningkatkan produksi, inovasi, dan ekspansi usaha.

5. Pembinaan Dan Pelatihan

- a) Menganalisis program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo untuk mendukung UMKM kain sutera.
- b) Menganalisis manfaat pelatihan UMKM kain Sutera dalam meningkatkan kualitas produksi, dan pemasaran.

6. Pendanaan dan akses pemasaran

- a) Tersedianya bantuan usaha, modal, pembiayaan, investasi dan kredit usaha.
- b) Meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap modal dalam pengembangan usaha.

7. Kerjasama dan sinergi

Mengidentifikasi sinergi dalam mendukung inovasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan pengrajin terkait dalam pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, pada 11 Januari sampai dengan 11 Maret. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Wajo, dan di Desa Pakanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

2) Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yang deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami karakteristik atau fenomena tertentu dalam konteks yang mendalam. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara induktif, dimana data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menganalisis tema, konsep

yang muncul dari data tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data adalah data yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan data sejumlah informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder dengan proporsi sesuai dengan penelitian.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden. Data ini diperoleh langsung dari lapangan, data yang diperoleh yaitu hasil wawancara, diskusi kelompok, rekamansuara/video. Data primer merupakan data pertama dimana sebuah data dihasilkan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan digunakan sebelumnya oleh pihak lain. Data ini berupa dokumen, rekaman, laporan penelitian, atau sumber-sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Data sekunder merupakan sumber data yang telah diolah atau dianalisis oleh orang lain sebelumnya. Sehingga peneliti dapat lebih memahami topik yang sedang diteliti.

D. Informan Penelitian

Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel tujuan (*purposive sampling*). Artinya teknik

penentuan sumber data dengan mempertimbangkan data terlebih dahulu. Yakni menentukan informan sesuai dan relevan dengan fenomena penelitian yaitu pengembangan UMKM kain sutera melalui *home industry*. Informan yang akan diambil yaitu kelompok UMKM kain sutera, pengrajin kain sutera dan Kepala Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo.

Dalam prosedur ini penting untuk menggunakan jaringan sosial untuk merujuk peneliti kepada orang lain yang berpotensi berpartisipasi untuk memberikan informasi yang relevan kepada peneliti. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah ialah kerjasama dengan pola kemitraan perdagangan umum. Adapun pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum ialah dapat berupa kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Choirunnisa, 2019).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

1) Wawancara

Salah satu metode yang digunakan pada saat pengumpulan data yaitu teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data atau informasi dengan melakukan interaksi antara pewawancara dan informan secara langsung untuk mendapatkan

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti dalam melakukan proses pengamatan, baik itu perilaku, kegiatan, dan interaksi sosial dalam konteks penelitian. Hal tersebut dapat memberikan suatu pemahaman tentang fenomena yang dikaji. Observasi merupakan kemampuan seseorang melakukan pengamatan melalui hasil kerja pancaindra. Tujuan dari observasi adalah untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai hal-hal yang diamati secara langsung, sehingga peneliti dapat menggali data yang diusulkan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang tertulis, visual, atau fakta yang dapat dinyatakan dalam bentuk gambar, angka, grafik, video, laporan, surat dan sebagainya. Tujuan dokumentasi adalah untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh dalam penelitian dapat diakses secara mudah dan dapat diverifikasi.

4) Studi kasus

Studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan analisis terhadap suatu peristiwa. Metode ini digunakan untuk menggali informasi yang lebih rinci dan mendalam tentang suatu masalah atau kejadian dalam konteks yang nyata. Peneliti dapat

melakukan studi kasus tentang individu, kelompok, organisasi, ataupun keluarga.

Studi kasus biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk memahami gambaran fenomena penelitian. Tujuan dari studi kasus adalah untuk mempelajari suatu masalah atau kejadian. Dengan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang masalah yang akan dikaji.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah data dan mengambil data. Selain itu, teknik analisis data merupakan suatu proses pemahaman tentang metode yang akan dikaji. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi (Anggia & Shihab, 2018), analisis data dalam melakukan dokumentasi sebagai bagian arsip penelitian. Tujuan dari analisis data yaitu untuk menggali makna yang terkandung dalam topik kajian yang akan diteliti.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi sumber data, metode, teori yaitu :

1) Triangulasi dengan sumber data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan : (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dilakukan sepanjang waktu; (3) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan; (4) membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

2) Triangulasi dengan metode

Triangulasi ini dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, dengan menggunakan metode interview, metode observasi. Dengan melakukan metode tersebut apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat interview (Hutabarat et al., 2022). Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data ketika melakukan interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang digunakan.

3) Triangulasi dengan teori

Triangulasi ini dilakukan dengan menguraikan pola hubungan dengan menyatakan penjelasan dari suatu analisis. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha untuk mengolah data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan yang logis dengan melihat apakah kemungkinan tersebut dapat ditunjang dengan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah kain sutera di Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Serta menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat pengembangan UMKM kain sutera.

Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu pemateri menguraikan secara singkat gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum lokasi Kabupaten Wajo, dan gambaran umum objek penelitian yaitu pengusaha kain sutera, penggrajin kain sutera dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Wajo (Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Wajo)

1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 2.506 km². Berdasarkan data terakhir tahun 2020, jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 190, dan jumlah penduduk 479.455 jiwa.

Table 4.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo Berdasarkan Kecamatan

No.	Kode	Kecamatan	Luas (km ²)	Desa /kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	731301	Sabbangparu	132.75	15	33.709
2.	731302	Pammana	162.10	16	37.566
3.	731303	Takkalalla	179.76	13	23.860
4.	731304	Sajoanging	167.01	9	22.981
5.	731305	Majauleng	225.92	18	40.581
6.	731306	Tempe	38.27	16	79.878
7.	731307	Belawa	172.30	9	36.487
8.	731308	Tanasitolo	154.60	19	46.213
9.	731309	Maniangpajo	175.96	8	19.309
10.	731310	Pitumpanua	207.13	27	51.484
11.	731311	Bola	220.13	11	24.299
12.	731312	Penrang	154.90	10	19.366
13.	731313	Gilireng	147.00	9	13.796
14.	731314	Keera	368.36	10	29.926
Total			2.506 km ²	190	479.455 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 2023

Gambar 4.1

Berikut luas kecamatan di Kabupaten Wajo dalam bentuk grafik



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 2023

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa luas kecamatan di Kabupaten Wajo pada posisi pertama ditempati oleh Kecamatan Majauleng, disusul oleh Kecamatan Keera, Bola, Sabbangparu, Takkalalla, Belawa, Maniangpajo, Pammana, Sajoanging, Tanasitolo, Penrang, Pitumpanua, Gilireng, dan yang terakhir Tempe.

Secara geografis, Kabupaten Wajo terletak pada $3^{\circ}39' - 4^{\circ}16'$ lintang selatan dan $119^{\circ}53' - 120^{\circ}27'$ bujur timur. Sebagian besar daerahnya dataran rendah hingga dataran bergelombang. Hanya sebagian kecil yang berupa perbukitan di utara. Gian timur berupa dataran rendah dan pesisir teluk Bone, sedangkan bagian barat merupakan dataran alluvial danau Tempe dan danau Sidenreng.

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a) Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Luwu
- b) Timur : Teluk Bone
- c) Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- d) Barat : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Soppeng

Kabupaten Wajo berarti bayangan (wajo-wajo) dalam bahasa Bugis, yang artinya pohon bajo, diadakan kontrak sosial antara masyarakat dan pemimpin adat yang sepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan disebuah tempat yang bernama Tosora, yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo.

Kabupaten Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal

system to manurung sebagaimana kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Kebesaran tanah Wajo pada masa dahulu, termasuk berkemajuan di bidang pemerintahan, kepemimpinan, demokrasi, dan jaminan terhadap hak-hak rakyatnya.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tanasitolo

Wilayah Kecamatan Tanasitolo merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Wajo yang berjarak sekitar 9 km kearah utara dari ibu kota Kabupaten Wajo. Kecamatan Tanasitolo mempunyai luas wilayah sekitar 154,60 km dengan jumlah penduduk 38,350 jiwa. Yang tersebar antara 15 desa/kelurahan. Tanasitolo merupakan salah satu daerah yang dijuluki sebagai pusat industri persuteraan terbesar di Sulawesi Selatan. (Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Wajo)

3. Gambaran Umum Pemerintah Kacamatan Tanasitolo

Pemerintah daerah merupakan wadah pelaksanaan fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kota untuk menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam menentukan pola organisasi, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari perilaku pemerintahan dalam merumuskan, merencanakan dan mengimplementasikan visi misi pemerintah daerah dalam pola organisasi. (Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Wajo)

4. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kabupaten Wajo

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo yang disingkat menjadi PERINDAGKOP dan UMKM, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 106 tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Wajo.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Wajo mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

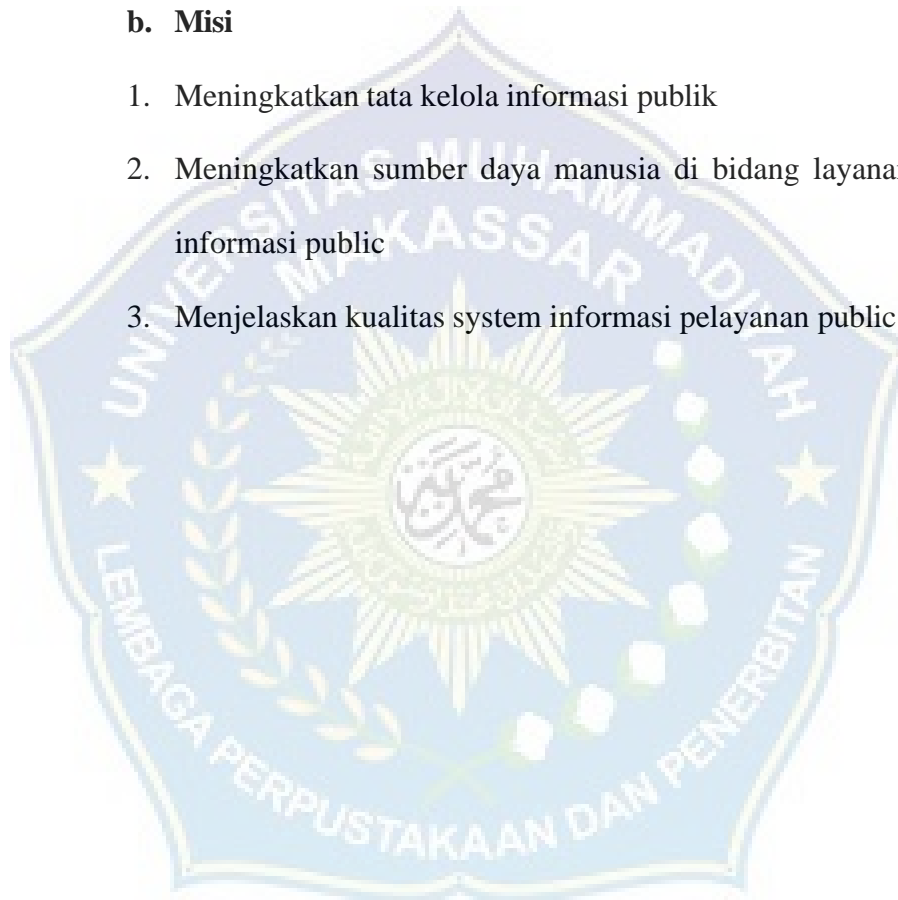
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

a. Visi

Terwujudnya layanan informasi public yang professional, transparan dan akuntabel

b. Misi

1. Meningkatkan tata kelola informasi publik
2. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang layanan informasi public
3. Menjelaskan kualitas system informasi pelayanan public

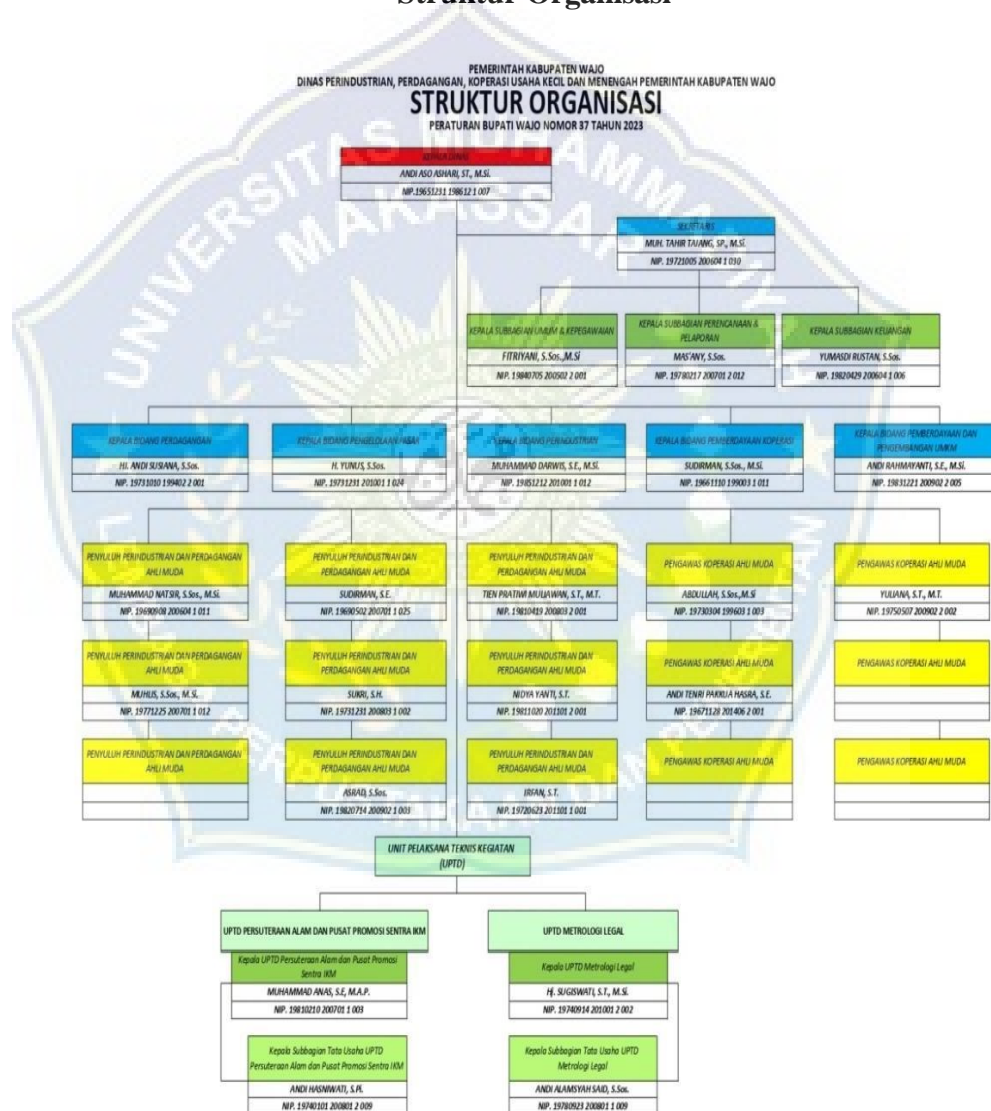


c. Struktur organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Gambar 4.2

Struktur Organisasi



Sumber : Dinas PERINDAGKOP, 2023

Berikut adalah data UMKM kain sutera di Desa Pakkanna,
Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

Table 4.2

Data UMKM kain sutera di Desa Pakkanna

NAMA USAHA	PEMILIK	ALAMAT	BENTUK BADAN USAHA	NAMA PRODUK	TENAGA KERJA /PENGRAJIN	NILAI INVESTASI	JUMLAH SATUAN /METER	NILAI PRODUKSI	NILAI BP/BB
	KASMAWATI	Jl.A Paki		Kain dan sarung sutera	5	5.000.000	240	12.000.000	7.000.000
SUTERA ALAM INDAH	H.SUKARDI	ANDI AHMAD	MILIK SENDIRI	Kain dan sarung sutera	6	30.000.000	1000	50.000.000	32.000.000
Ida sutra	Ida	jl. Andi pawellanggi	Perorangan	Kain dan sarung sutera	2	5.000.000	240	12.000.000	7.000.000
Anisa	Anisa	jl.matuppuang	Perorangan	Kain dan sarung sutera	7	5.000.000	240	12.000.000	7.000.000
LOSARI SILK	H. BAJI	JL. A. BASO	√	Kain dan sarung sutera	7	#####	1000	50.000.000	20.000.000
	H. AMBO EMME			Kain dan sarung sutera	10	15.000.000	50	20.000.000	8.000.000
	INDO INTANG			Kain dan sarung sutera	20	20.000.000	50	20.000.000	8.000.000
RIFKI SUTRA	MUHTANG	ASSORAJAN G	-	KAIN LAGOSI	-	20.000.000	500	25.000.000	10.000.000
-	H.CONDENG	JL.BAKKEDE	-	KAIN SUTRA	5	20.000.000	500	25.000.000	10.000.000
ADENNY SILK	H. ARDANI	Jl. Andi Malingkaan	-	KAIN SUTERA	3	#####	5000	#####	#####

Sumber : Dinas PERINDAGKOP,2022

Tabel 4.3

Akumulasi Data Industri Kain Sutera (2021-2022)

Tahun	Jumlah Pengusaha
2021	15
2022	45

Sumber : Dinas PERINDAGKOP,2022

Akumulasi data pengusaha tenun sutera dari tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari jumlah pengusaha kain sutera di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo. Sehingga penyuluh dari Dinas PERINDAGKOP memaksimalkan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada sektor pengrajin sutera. Serta adanya pemberian

bantuan modal untuk pembelian perlengkapan tenun, seperti benang, kain dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan masyarakat pengrajin sutera.

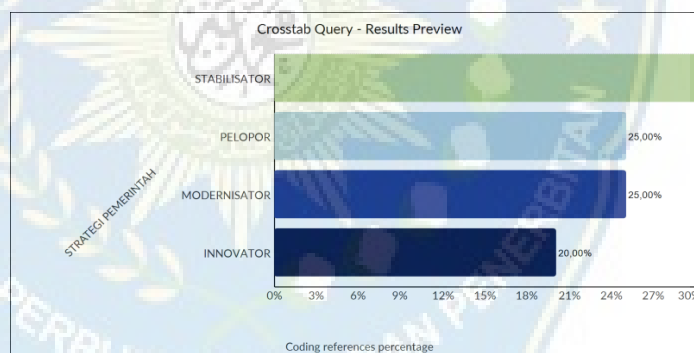
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Kain Sutera

Strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera dalam memberdayakan penenun sutera telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Dengan ini, peneliti akan menjelaskan indikator yang meliputi, stabilisator, innovator, modernisator, dan pelopor.

Gambar 4.3

Strategi Pemerintah



Sumber hasil analisis dari NVivo,2024

Dari hasil analisis data dari aplikasi NVivo menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam strategi pemerintah yang dimana menunjukkan bahwa strategi pemerintah sebagai stabilisator sebanyak 30% berperan dalam menciptakan kestabilan ekonomi dalam pengembangan UMKM kain sutera. Hal ini dilakukan dengan memberikan berbagai kebijakan dan regulasi yang dapat menjaga kondisi ekonomi yang kondusif bagi kelompok

UMKM kain sutera dan masyarakat pengrajin kain sutera.

Sedangkan, pemerintah sebagai pelopor sebanyak 25% bertugas sebagai pihak yang mempromosikan dan mendukung perkembangan UMKM kain sutera. Dengan hal tersebut, pemerintah dapat memberikan peluang untuk perkembangan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo.

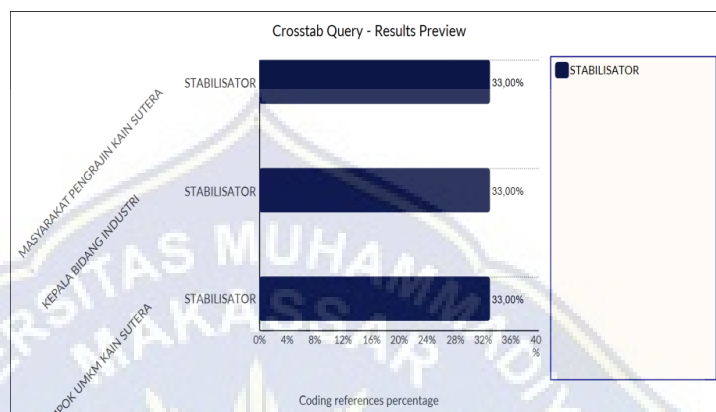
Adapun perbandingan dengan strategi pemerintah sebagai modernisator, yaitu sebanyak 25%. Dalam hal tersebut pemerintah berupaya untuk memodernisasi UMKM kain sutera dengan memperkenalkan teknologi dan sistem manajemen terbaru. Pemerintah juga telah memfasilitasi dan membantu dalam pengembangan UMKM kain sutera dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan agar dapat bersaing di pasar global.

Adapun strategi pemerintah sebagai innovator sebanyak 20%, berperan sebagai penggagas ide-ide inovatif dalam pengembangan UMKM kain sutera. Dengan itu, pemerintah dapat menciptakan peluang dalam mengimplementasikan ide-ide baru untuk meningkatkan daya saing dan kreativitas pengrajin dan kelompok UMKM kain sutera.

1. Stabilisator

Gambar 4.4

Pemerintah sebagai stabilisator



Sumber hasil analisis dari NVivo,2024

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan bahwa adanya kesamaan antara dukungan dari berbagai pihak yaitu masyarakat pengrajin kain sutera, kelompok UMKM kain sutera dan kepala bidan industri yang dimana data tersebut menghasilkan persamaan. Pemerintah sebagai stabilisator dalam pengembangan UMKM kain sutera dapat lebih efektif dalam mengarahkan, mengelola program yang mendukung dalam menumbuh kembangkan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo.

Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan untuk pengembangan sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengembangan UMKM kain

sutera, pemerintah menyediakan infrastruktur. Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap laju perkembangan UMKM karena sarana dan prasarana infrastruktur mempunyai peran yang strategis dalam proses produksi, distribusi, maupun pemasaran.

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua Bidang Perindustrian, bahwa :

“Pemerintah Daerah telah memberikan serta menyediakan infrastruktur yang mendukung dalam pengembangan UMKM kain sutera. Infrastruktur merupakan bagian dari modal fisik yang tak kalah penting dari modal lainnya. Dalam bentuk pengadaan gedung atau ruang produksi, penyediaan sarana transportasi, dan pengembangan jaringan akses internet. Pemerintah telah menyediakan alat tenun yang telah dibagikan kepada masyarakat pengrajin kain sutera. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, pemerintah Kabupaten Wajo meningkatkan efisiensi dan produktifitas kain sutera” (wawancara dengan Muhammad Darwis Kamis 18 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat mengerti bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo telah memfasilitasi kelompok UMKM dan pengrajin kain sutera dalam bentuk pengadaan gedung atau ruang produksi, penyediaan sarana transportasi, dan pengembangan jaringan akses internet. Serta alat tenun yang telah dibagikan kepada masyarakat pengrajin kain sutera.

Selanjutnya hasil wawancara dengan kelompok UMKM sekaligus pengusaha pengrajin kain sutera yang mengatakan bahwa :

“Kami telah menerima bantuan dari pemerintah sebagai salah satu upaya dalam stabilisasi usaha kami. Bantuan yang diberikan yaitu dalam bentuk alat tenun, serta pengembangan jaringan untuk mengakses produksi, distribusi maupun

pemasaran. Namun, kami tidak menerima bantuan dalam hal pengadaan ruang produksi, dikarenakan usaha ini saya kembangkan sendiri baik itu dari sistem keuangan” (wawancara dengan Ibu Reni, Senin 22 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sektor UMKM di desa Pakkanna Kabupaten Wajo tidak menerima bantuan modal berupa uang, dikarenakan mereka mengembangkan usahanya secara mandiri, melainkan mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan fisik seperti pembagian alat tenun untuk pengrajin kain sutera oleh pemerintah. Sehingga masyarakat pengrajin dapat memproduksi, dan pengusaha dapat memaksimalkan pemasaran kain sutera baik itu *offline* maupun *online*.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Dayat sebagai pengusaha UMKM kain sutera mengatakan bahwa :

“Bantuan saran dan prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah dalam memfasilitasi kami dalam bentuk bantuan pemasaran. Seperti pengadaan pameran kain sutera, sangatlah membantu penjualan produksi usaha kami” (wawancara dengan Bapak Dayat, Kamis 18 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kelompok UMKM telah mendapat bantuan dari pemerintah, yakni pemerintah mengadakan pameran dalam bentuk pemasaran produksi kain sutera.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Intan selaku masyarakat pengrajin yang menyatakan bahwa :

“Kami telah terbantu dengan adanya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada kami, seperti alat tenun,

benang, serta perkakas yang digunakan pada saat pembuatan kain sutera. Kami berusaha memanfaatkan dengan baik dan mengelola agar kami dapat memproduksi kain sutera yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pasar dunia.” (wawancara dengan Ibu Intan, Kamis 18 Januari 2024)

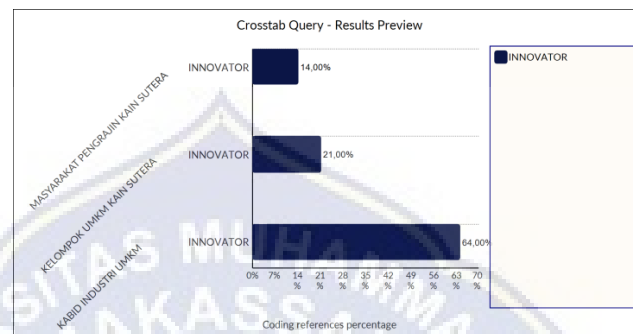
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat memproduksi tenunan yang lebih berkualitas dan lebih meningkat.

Dengan adanya peran pemerintah sebagai stabilisator dalam pengembangan UMKM kain sutera bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo yang menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan oleh kelompok UMKM dan pengrajin sutera. Bertujuan untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat pengrajin dan kelompok UMKM. Maka diharapkan sektor UMKM kain sutera dapat berkembang dengan baik, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

2. Innovator

Gambar 4.5

Pemerintah sebagai innovator



Sumber hasil analisis dari NVivo, 2024

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan bahwa adanya hasil data dalam pengembangan UMKM kain sutera, yang dimana masyarakat pengrajin menunjukkan data sebanyak 14% bertujuan untuk membuat kebijakan yang mendukung dalam pengembangan UMKM kain sutera. Dengan itu, pemerintah akan membantu dan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengrajin dan pengusaha UMKM kain sutera.

Adapun peran kelompok UMKM kain sutera sebanyak 21%, dimana merekalah yang akan melakukan produksi sehari-hari dan menjalankan ktivitas bisnis secara langsung. Mereka bertanggung jawab dalam mengelolah pemasaran dan kualitas produk agar terus berkembang.

Sedangkan peran pemerintah dalam pengembangan UMKM

kain sutera memiliki peran terbesar sebanyak 50%, dimana pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan UMKM kain sutera yakni, bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan UMKM kain sutera. Dengan hal tersebut, Pemerintah akan mengkoordinasi dengan pihak yang terkait. Seperti, pemasok bahan baku, distributor, dan pihak lainnya untuk memastikan kelancaran produksi kain sutera.

Dengan hal tersebut, sebagai innovator pemerintah mampu menciptakan ide-ide baru dalam mengembangkan solusi yang kreatif. Pemerintah dapat memberikan dorongan yang dapat memperkuat potensi industri kain sutera untuk mendorong kreatifitas dan prekomunian sektor UMKM kain sutera dan masyarakat pengrajin secara keseluruhan. Membangun jejaring dan kerjasama dengan sektor UMKM kain sutera dengan pengrajin kain sutera dengan desainer, pengusaha tekstil, dan pemasok bahan baku. Dengan kerjasama tersebut dapat memfasilitasi pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan inovasi dan daya saing UMKM kain sutera.

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua Bidang Perindustrian, bahwa :

“Benar adanya bahwa jaringan dan kerja sama sangat penting untuk meningkatkan daya saing di dunia pemasaran, sejauh ini kami telah menyediakan saran dan prasarana untuk membantu kelangsungan usaha industri kain sutera. Jaringan kerjasama yang kami telah sediakan dari pemerintah yaitu sektor UMKM sebagai distributor dengan kelompok

pengrajin kain sutera sebagai produsen. Dengan hal tersebut mereka saling bekerja sama satu sama lain”.(wawancara dengan Muhammad Darwis, Kamis 18 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan jaringan dan kerja sama antara sektor UMKM kain sutera sebagai distributor dan pengrajin sebagai produsen sehingga mampu mengelola prekomunian serta memenuhi kemauan konsumen.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Dayat selaku kelompok UMKM mengatakan bahwa :

“Dengan kebijakan pemerintah sebagai innovator yakni dimana pemerintah memberikan inovasi yang baru terhadap perkembangan pemasaran produksi kain sutera, dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan kelompok pengrajin kain sutera dengan sektor pengusaha kain sutera, kami sangat terbantu dan kami bisa memenuhi produksi pemasaran” (wawancara dengan Bapak Dayat, Kamis 18 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan memenuhi kebutuhan konsumen, sektor UMKM kain sutera telah terbantu dengan adanya kebijakan pemerintah yakni dengan melakukan kerja sama dengan pengrajin atau penenun kain sutera.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Isa selaku masyarakat pengrajin kain sutera mengatakan bahwa :

“Dengan adanya bantuan jaringan kerjasama dari pemerintah dengan sektor UMKM kain sutera itu akan mempermudah kami sebagai masyarakat penenun sutera sehingga hasil

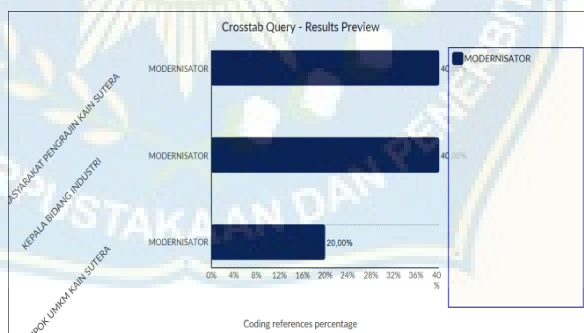
tenunan kami semakin berkualitas dan lebih meningkat”(wawancara dengan Ibu Isa, Senin 22 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian berupa sarana dan prasarana dari pemerintah dapat mempermudah masyarakat penenun atau pengrajin kain sutera dalam meningkatkan hasil tenun yang berkualitas.

Bentuk peran pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera dari segi innovator yakni memberikan inovasi kepada sektor UMKM dan pengrajin kain sutera, agar dapat meningkatkan daya saing UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. Dengan memajukan sektor industry lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

3. Modernisator

Gambar 4.6



Sumber hasil analisis dari NVivo,2024

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan perbedaan antara strategi dalam pengembangan UMKM kain sutera. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat pengrajin yang menghasilkan data sebanyak 40%.

Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pengrajin untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam memproduksi kain sutera yang berkualitas.

Pemerintah juga memberikan dukungan sebanyak 40%, yakni dengan membantu memfasilitasi kebutuhan pengrajin dan kelompok UMKM kain sutera dalam melakukan produksi dan pemasaran kain sutera. Sementara itu, kelompok UMKM mmenghasikan data sebanyak 20%, yang dimana mereka mendapatkan dukungan dan fasilitas secara finansial, pelatihan manajemen, serta akses dalam meningkatkan kualitas produk untuk berkembang dan dapat bersaing di pasar lokal maupun global.

Peran Pemerintah sebagai modernisator dalam pengembangan UMKM kain sutera, pemerintah dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan daya saing di pasar global. Pemerintah menyediakan dana dan dukungan untuk penelitian dalam pengembangan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna.

Dalam pengembangan pusat modernisasi yang berfungsi untuk mendukung penelitian dan pengembangan industri kain sutera. Dengan adanya pusat inovasi, UMKM kain sutera dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang akan membantu mereka dalam meningkatkan produksi pemasaran. Sebagai modernisator, pemerintah bertanggung jawab dalam mengintegrasikan perubahan teknologi, kebijakan ekonomi, serta transformasi sosial dalam pengembangan UMKM kain sutera.

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua Bidang Perindustrian, bahwa :

“Kami telah memberikan pelatihan dan pendidikan untuk sektor UMKM kain sutera dan pengrajin kain sutera. Pelatihan tersebut dapat mencakup teknik produksi, desain, pemasaran, manajemen usaha perindustrian kain sutera. Pemerintah berperan sebagai modernisator dalam pengembangan UMKM kain sutera, dengan hal tersebut pemerintah telah berperan dalam mengembangkan modernisasi agar UMKM kain sutera dapat berkembang dengan lancar”(wawancara dengan Muhammad Darwis, Kamis 18 Jan 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Wajo sebagai modernisator dalam pengembangan UMKM kain sutera. Pemerintah telah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan khusus dalam mengkaji dan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan produk yang berkualitas.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Reni selaku kelompok UMKM mengatakan bahwa :

“Dengan pengadaan pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, kami selaku sektor pengusaha kain sutera sangat membantu kami dalam proses pemasaran produk”. (wawancara dengan Ibu Reni, Senin 22 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan baik itu proses distribusi, produksi, dan pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat membangun semangat sektor UMKM dalam proses distribusi, produksi, serta pemasaran global.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Norma selaku pengrajin kain sutera mengatakan bahwa :

“Dengan pelatihan dan pendampingan yang kami dapatkan pada saat pendidikan. Kami selaku masyarakat pengrajin sangat membantu dalam proses pelatihan tersebut, sehingga kami dapat mengkreasikan motif baru sesuai dengan harapan konsumen, dan tingkat pemasaran bisa lebih berjalan dengan lancar”.(wawancara dengan Ibu Norma, Senin 22 Januari 2024)

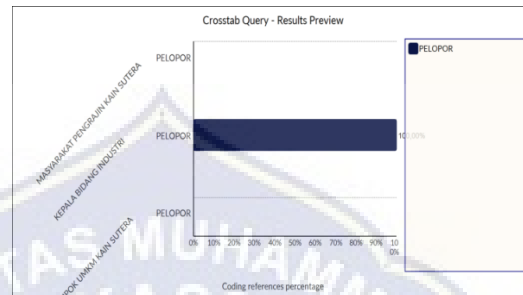
Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada pengrajin kain sutera sangat membantu dalam proses penunuan kain sutera sesuai dengan harapan konsumen, dan tingkat permintaan pemasaran juga lebih efektif.

Dengan melibatkan pemerintah sebagai modernisator dalam pengembangan UMKM kain sutera. Diharapkan sektor UMKM kain sutera dan pengrajin dapat lebih berkembang, produktif dan mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional. Serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pengrajin dan melestarikan kebudayaan tradisi dalam pembuatan kain sutera di Kabupaten Wajo.

4. Pelopor

Gambar 4.7

Pemerintah sebagai pelopor



Sumber hasil analisis dari NVivo,2024

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan peran pemerintah sebagai pelopor dalam pengembangan UMKM kain sutera. Dalam hal tersebut, Pemerintah perlu mengkaji dan meningkatkan regulasi yang mendukung dalam pengembangan UMKM kain sutera. Sebagai pelopor, pemerintah harus mampu membentuk dan memperkuat regulasi yang efektif dalam meningkatkan keterampilan, pendidikan dan memfasilitasi program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua

Bidang Perindustrian, bahwa :

“Kami telah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pengusaha UMKM kain sutera. Dengan itu, kami menyediakan workshop dan kursus untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam produksi kain sutera. Kami juga memberikan bantuan secara finansial kepada UMKM dan pengrajin kain sutera yang ingin memperluas usaha mereka atau meningkatkan kualitas produk mereka. Ini termasuk

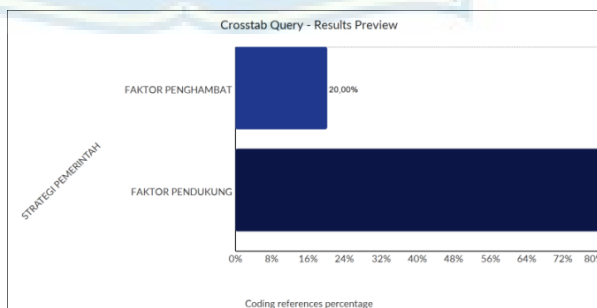
program bantuan dari pemerintah seperti memfasilitasi Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) kepada pengrajin kain sutera. Kami juga telah mempromosikan kain sutera UMKM secara aktif baik dalam negeri maupun luar negeri. Kamu juga menghadiri pameran dan acara bisnis untuk memperluas jangkauan pemasaran. .”(wawancara dengan Muhammad Darwis, Kamis 18 Januari 2024)”

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa melalui peran pemerintah sebagai pelopor dalam pengembangan UMKM kain sutera, dengan itu pemerintah telah melakukan program yang mendukung kelangsungan produksi dan pemasaran oleh sektor UMKM kain sutera dengan pengrajin kain sutera. Serta pemerintah juga memberikan bantuan secara finansial sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan pengrajin kain sutera untuk meningkatkan kualitas produk.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengembangan UMKM kain Sutera

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo

Gambar 4.8



Sumber hasil analisis dari NVivo,2024

Mengenai hasil penelitian dari aplikasi NVivo menunjukkan

bahwa strategi pemerintah dalam faktor pendukung sebanyak 80% menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera sesuai dengan target pemasaran, serta adanya tingkatan inovasi dari pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo.

Sedangkan faktor penghambat sebesar 20%, yang dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam persaingan global, sehingga dapat menjadi salah satu masalah dalam pengembangan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo. Namun dengan penanganan dan strategi pemerintah dapat berkembang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya dalam memperhatikan faktor-faktor mengenai strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo.

1. Faktor Pendukung

a. Potensi Bahan Baku

Salah satu strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera adalah memastikan bahwa ketersediaan bahan baku yang sudah memadai untuk perkembangan produksi kain sutera di Kabupaten Wajo.

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua Bidang Perindustrian, bahwa :

“Pemerintah menyatakan bahwa bahan baku yang mereka dapatkan dari petani sutera lokal yang memiliki kualitas yang

tinggi, selain memanfaatkan produk lokal, mereka juga menggunakan bahan baku import untuk memberikan kualitas yang lebih baik”(wawancara dengan Muhammad Darwis 18 Januari 2024).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi bahan baku dalam pembuatan kain sutera menggunakan produk lokal dan sebagian menggunakan produk import untuk memberikan hasil yang maksimal.

Hasil wawancara dengan Ibu Isa selaku kelompok pengrajin kain sutera mengatakan bahwa :

“Pada saat penenunan tidak semua bahan yang kami gunakan itu dari lokal, kami juga menggunakan benang import yang biasa disebut dengan benang india dan benang cina untuk membuat motif khas bugis memberikan kualitas yang lebih baik” (wawancara dengan Ibu Isa, Senin 22 Januari 2024)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk meningkatkan kualitas produk kain sutera, pengrajin juga menggunakan bahan import dari luar untuk membuat motif khas bugis, agar lebih tahan lama dan lebih berkualitas.

b. Keterampilan Tenaga Kerja

Dengan keterampilan tenaga kerja pengrajin kain sutera, pemerintah dapat membuat pelatihan bagi pengrajin kain sutera untuk menggali dan mengasah potensi pengrajin.

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua Bidang Perindustrian, bahwa :

“Salah satu faktor pendukung dalam pengembangan UMKM kain sutera, yaitu pemerintah turut andil dalam memajukan masyarakat pengrajin kain sutera yakni dengan cara memberikan pelatihan dalam mengembangkan motif kain sutera agar tetap dijaga sebagai warisan turun temurun yang

perlu dilestarikan, pendampingan. Selain itu kami bekerja sama dengan pihak lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan khusus dalam pengembangan desain dan teknik produksi yang lebih modern. Pelatihan ini kami laksanakan sekali dalam setahun.”(wawancara dengan Muhammad Darwis, Kamis 18 Januari 2024)”

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam mengembangkan UMKM kain sutera yaitu dengan melaksanakan program pelatihan dan pendampingan kepada sektor UMKM dan pengrajin kain sutera yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sektor UMKM dan pengrajin mendapatkan bimbingan dan dukungan yang penuh dalam mengembangkan usaha kain sutera.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ibu Reni selaku kelompok UMKM sekaligus pengusaha pengrajin kain sutera mengatakan bahwa

“Salah satu faktor yang menjadi pendukung dari upaya pemberdayaan adalah komitmen pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pengrajin dan sektor UMKM. Pemerintah memberikan fasilitas yang mendukung produk unggulan agar terus berkembang salah satu dukungan dari pemerintah yaitu memberikan pelatihan keterampilan dalam pembuatan kain sutera, manajemen usaha, kepemimpinan, pemasaran dan berbagai aspek yang dibutuhkan” (wawancara dengan Ibu Reni 22 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak pemerintah telah memberikan pendampingan yang dibutuhkan oleh masyarakat pengrajin maupun sektor UMKM kain sutera, hal tersebut dapat meningkatkan dan mendukung produktivitas UMKM kain sutera terus berkembang.

c. Pemasaran dan Produksi

Dengan menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM kain sutera. Dengan melakukan pemasaran dan produksi yang efektif dapat meningkatkan penjualan dan pengenalan kain sutera kepada masyarakat luar. Dukungan dari pemerintah tersebut dapat menjadi faktor penting bagi perkembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo.

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua Bidang Perindustrian, bahwa :

“Pemerintah Kabupaten Wajo mendukung adanya pemasaran dan promosi untuk mendukung perkembangan kain sutera di Kabupaten Wajo. Pemasaran dan produksi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu membuka bazar, mengadakan pameran produk khusus kain sutera, melakukan penjualan online, membantu mendapatkan sertifikasi label produk yang berkualitas dan memfasilitasi akses pemasaran lokal maupun global”.(wawancara dengan Muhammad Darwis 18 Januari 2024)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan dukungan pemerintah membuka peluang pemasaran dan produksi, pemerintah melaksanakan bazar untuk pengenalan produk kain sutera di masyarakat luar, mengadakan pameran kain sutera, melakukan penjualan online, serta membantu mendapatkan sertifikasi label produk yang berkualitas dan mendukung distribusi pemasaran.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Dayat selaku sektor UMKM kain sutera mengatakan bahwa :

“Dengan dukungan yang diberikan dari pemerintah yaitu membantu dalam proses pemasaran dan produksi. Kami telah

mengikuti berbagai event yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mempromosikan dan memasarkan produk kami, serta adanya pameran yang membantu kami dalam meningkatkan penjualan, baik itu melalui media sosial, brosur website dan sebagainya.” (wawancara dengan Bapak Dayat, Kamis 18 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memfasilitasi sektor UMKM kain sutera dalam memfasilitasi akses pemasaran, yaitu dengan mengadakan bazar, event, yang digelar untuk mempromosikan dan memasarkan produk kain sutera agar lebih dikenal pusat pemasaran global.

d. Infrastruktur

Mengenai tentang infrastruktur yang memadai pemerintah melibatkan berbagai perencanaan, pengembangan serta pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang diperlukan sektor UMKM kain sutera maupun masyarakat pengrajinn untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pengrajin kain sutera maupun sektor UMKM kain sutera.

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis sebagai Ketua Bidang Perindustrian, bahwa :

“Untuk mendukung ketersediaan infrastruktur dalam pengembangan UMKM kain sutera, maka hal tersebut pemerintah Kabupaten Wajo memfasilitasi infrastruktur seperti memberikan bantuan fisik yaitu alat tenun, pusat produksi, pusat pelatihan dan pendampingan serta tempat pemasaran kain sutera. Infrastruktur tersebut dapat membantu masyarakat untuk mempercepat proses pembuatan produk, meningkatkan kualitas dan mendukung distribusi pemasaran” (wawancara dengan Muhammad Darwis, Kamis 18 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan mendukung pengusaha UMKM kain sutera dan masyarakat pengrajin, pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana dalam hal tersedianya infrastruktur yang sudah memadai. Seperti, memfasilitasi masyarakat pengrajin dengan memberikan alat tenun, pusat produksi, seperti pengadaan bazar, pameran, melaksanakan program pendampingan dan pelatihan. Tujuan dari hal tersebut yaitu untuk membantu sektor UMKM kain sutera dan pengrajin kain sutera dapat berkembang dan bersaing di dunia global.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Dayat sebagai pengusaha UMKM kain sutera mengatakan bahwa :

“Pemerintah memberikan bantuan dalam hal pengembangan UMKM kain sutera yaitu dengan mewadahi kami infrastruktur yang memadai. Dengan hal tersebut kami bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti mengikuti event, bazar, pameran untuk mengenalkan kain sutera di masyarakat luar maupun global” (wawancara dengan Bapak Dayat, Kamis 18 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memfasilitasi sektor UMKM kain sutera dan masyarakat pengrajin kain sutera yaitu melaksanakan event, pameran, bazar khusus produk kain sutera. Dengan tujuan untuk membantu distribusi pemasaran kain sutera dan memperluas pemasaran.

Secara keseluruhan mengenai faktor pendukung dalam pengembangan UMKM kain sutera, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian telah memaksimalkan pengembangan UMKM kain

sutera. Dengan tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan maksimal, sehingga sektor UMKM kain sutera dengan pengrajin kain sutera di Kabupaten Wajo bisa berkembang dan dikenal di dunia global.

2. Faktor Penghambat

Sementara itu, adapun faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kelangsungan pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo, yaitu adanya persaingan global kehadiran produk kain sutera import yang lebih murah dan mudah di akses dapat menjadi faktor penghambat bagi UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. Dengan persaingan tersebut dapat mengancam kelangsungan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo.

Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Darwis sebagai Ketua Bidang Perindustrian:

“Faktor yang menjadi penghambat lainnya menurut saya adalah masih banyak konsumen yang masih belum percaya dengan produk lokal. Berbicara tentang kualitas, kualitas kain sutera sangat layak untuk disaparkan ke masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kembali lagi dengan pola pikir masyarakat yang terbilang masih lebih mengedepankan produk-produk import daripada lokal. Melalui pemasaran tersebut pemerintah Kabupaten Wajo akan mengambil langkah-langkah yang lebih efisien dan efektif yang menguntungkan kedua belah pihak”(wawancara dengan Muhammad Darwis, Kamis 18 Januari 2024)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang lebih menginginkan produk luar dibandingkan produk lokal. Dari hasil wawancara tersebut dapat mewakili semua argument sektor UMKM kain sutera dan sektor pengrajin kain sutera.

Dengan menindaklanjuti masalah tersebut pemerintah daerah khususnya generasi muda agar lebih mengutamakan produk dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan prekomunian masyarakat pengrajin kain sutera dan sektor UMKM kain sutera.

Dari seluruh hasil observasi penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat kelangsungan UMKM kain sutera. Faktor pendukung dalam pengembangan UMKM kain sutera yaitu potensi bahan baku, keterampilan tenaga kerja, pemasaran dan produksi, serta infrastruktur yang sudah berkembang. Adapun faktor penghambat pengembangan UMKM kain sutera yaitu ketatnya persaingan global yang memungkinkan menjadi salah satu kendala dalam prekomunian masyarakat pengrajin kain sutera.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Pemerintah sebagai stabilisator berperan untuk menjaga stabilitas UMKM kain sutera. Sebagai innovator juga memiliki peran untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru pada suatu agar dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. Dalam mengarahkan masyarakat menuju modernisasi, sebagai modernisator pemerintah memberikan suatu pendidikan dan pelatihan sumber agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kualitas mutu produk. Sebagai pelopor pemerintah ber peran sebagai perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan. Sehingga mampu menunjukkan contoh nyata dan mendorong semangat masyarakat melalui tindakan yang bermanfaat.
2. Strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat kelangsungan UMKM kain sutera. Faktor pendukung dalam penegembangan UMKM kain sutera yaitu potensi bahan baku, keterampilan tenaga kerja, pemasaran dan produksi, serta infrastruktur yang sudah berkembang. Adapun faktor penghambat pengembangan UMKM kain sutera yaitu ketatnya persaingan global yang memungkinkan menjadi salah satu kendala dalam prekomunian masyarakat maupun sektor pengrajin kain sutera.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terkait strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo, tepatnya di Desa Pakkanna, adapun beberapa saran agar masyarakat pengrajin dan sektor UMKM kain sutera semakin berdaya, yaitu :

1. Dinas perindustrian harus selalu melakukan pemantauan, sosialisasi agar usaha yang dijalankan berjalan sesuai dengan harapan, termasuk dalam pelatihan, pembinaan maupun pengetahuan dan pendampingan agar usaha masyarakat semakin meningkat.
2. Masyarakat pengrajin kain sutera harus lebih kreatif lagi, dan selalu melibatkan diri dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, agar produksi yang dihasilkan lebih meningkat dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggia, M. N., & Shihab, M. R. (2018). Strategi Media Sosial Untuk Pengembangan Umkm. *Jurnal Terapan Teknologi Informasi*.
<https://jutei.ukdw.ac.id/index.php/jurnal/article/view/125>
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM digital di masa pandemi covid-19. *ATRABIS:JurnalAdministrasiBisnis (e-Journal)*.
<http://www.jurnal.plb.ac.id/index.php/atrabis/article/view/512>
- Choirunnisa, N. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Perjanjian Kemitraan Antara Carrefour dan Pemasoknya. In *Jurist-Diction* (Vol. 2, Issue 3, p. 1083). Universitas Airlangga.
<https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14374>
- Dewi, A. R. S., Kadir, A. R., Hamid, N., & (2021). Pelatihan Motivasi Dan Pengembangan Usaha Bagi Pengurus Dan Anggota Umkm Di Kabupaten Wajo Menghadapi Shock Pandemi Covid. *Jurnal Dinamika....*,6(2),357–364.
<https://54.254.27.92/index.php/jdp/article/view/11857>
- Engel. (2017). Teori Pengembangan. *Paper Knowledge . Toward a Media Historyof Documents*, 11–23.
- Febriantoro, W. (2018). Kajian dan strategi pendukung perkembangan e-commerce bagi UMKM Di Indonesia. In *Jurnal Manajerial*.
[academia.edu](https://www.academia.edu/download/84168340/pdf_1.pdf).
https://www.academia.edu/download/84168340/pdf_1.pdf
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
<http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jep/article/view/45>
- Hutabarat, M. P. A., Yunita, N. A., Putri, R. G., & Indrayani, I. (2022). Pengaruh Modal Usaha, Penggunaan Informasi Akuntansi Dan Sistem Penjualan E- commerce Terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan

- Menengah Di Kota Lhokseumawe). In *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* (Vol. 1, Issue 1,p.1). LPPM Universitas Malikussaleh. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6852>
- Ibrahim, H. R. (2022). Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui pendekatan inovasi sosial dan *collaborative governance*. In *Jurnal Ilmu dan Budaya* (Vol. 43, Issue 1, p. 103). Universitas Nasional. <https://doi.org/10.47313/jib.v43i1.1532>
- Mukhsin. (2019). Manfaat penerapan marketing online (menggunakan e-commerce dan media sosial) bagi usaha mikro, kecil dan menengah (umkm). In *teknokom* (vol. 2, issue 1, pp. 1–10). Universitas wiralodra. <https://doi.org/10.31943/teknokom.v2i1.25>
- Mustari, N., Yahya, M., & Amin, M. (2021). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Civic Literacy Dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Buakkang. *Transformasi : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(3), 109. <https://doi.org/10.31764/transformasi.v1i3.5618>
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 01 <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Pérez,A.(2017).Title. *BMCPublicHealth*, 5(1),18.<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Puspasari, A. N., Haris, H., Baharuddin, A., Aslinda, A., & Darwis, M. (2022). (*Studi Kasus pada Pengrajin Sutera Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo*) pasar internasional , salah satunya adalah Sarung Sutera . Sarung Sutera yang selama ini berkesempatan berkunjung atau sekedar memesan cedera mata yang berasal dari Kota berlangsung. 1(1), 35–42.

- Rindrayani, S. R. (2017). Strategi industri kreatif pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka menjawab tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Center for Open Science. <https://doi.org/10.31227/osf.io/83kd7>
- Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137–143. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. In Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi (Vol. 19, Issue 1, pp. 76–86). P4M STIE Putra Bangsa. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Yusnita, I., Putri, M., & Amaliah, W. N. (2022). Penerapan penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah berbasis standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah. In *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* (Vol. 3, Issue 1, pp. 51–62). Institut Agama Islam Negeri Kerinci. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i1.1158>

L

A

M

P

I

R

A

N



Pembuatan Surat Pengantar Penelitian



Pembuatan surat pengantar penelitian melalui kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu, ke tempat penelitian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM tepatnya di Kota Sengkang, Senin 15 Januari 2024.

Penerimaan Surat Penelitian



Penerimaan surat oleh Ibu Eka selaku staf kantor, di ruangan bagian industri, Di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Kabupaten Wajo tepatnya pada hari Rabu 17 Januari 2024.

Wawancara Bersama Ketua Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM



Pengambilan data melalui wawancara bersama dengan Bapak Muhammad Darwis, selaku ketua bidang perindustrian, di ruang kerjanya kantor Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi UMKM, tepatnya pada hari Kamis 18 Januari 2024.

Wawancara dengan Pengusaha UMKM Kain Sutera



Wawancara dengan Bapak Dayat selaku pengusaha UMKM kain sutera, bertempat di toko produksinya Adenny Silk, pada hari Kamis 18 Januari 2024.

Wawancara Dengan Masyarakat Pengrajin Kain Sutera



Wawancara dengan Ibu Intan selaku masyarakat pengrajin kain sutera, di rumahnya di Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, tepat pada hari Kamis, 18 Januari 2024.

Wawancara dengan Pengusaha UMKM Kain Sutera



Wawancara dengan ibu Reni selaku pengusaha UMKM kain sutera di ruang produksinya Losari Silk, di Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, pada hari Kamis 22 Januari 2024.

Wawancara Dengan Masyarakat Pengrajin Kain Sutera



Wawancara dengan Ibu Norma selaku masyarakat pengrajin kain sutera, dirumahnya di Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, pada hari Senin 22 Januari 2024.

Ruang Produksi Kain Sutera “Losari Silk”



Gambaran ruang produksi Losari Silk, di Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, pada hari Kamis 18 Januari 2024

Wawancara Dengan Masyarakat Pengrajin Kain Sutera



Wawancara dengan Ibu Isa selaku masyarakat pengrajin kain sutera, di rumahnya di Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, pada hari Senin, 22 Januari 2024.



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisp@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisp.unismuh.ac.id

Nomor : 0064/FSP/A.6-VIII//1445 H/2024 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Nurfitriya Anugrah
Stambuk : 105641104020
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Desa Pakanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
Judul Skripsi : ***"Strategi Pemerintah Kabupaten Wajo dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kain Sutera di Desa Pakkanna"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 11 Januari 2024

Ketua Jurusan

Ahmad Hanakan, S.IP., M.Hum
NBM: 1207 163



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3306/05/C.4-VIII/1/1445/2024
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 January 2024 M
29 Jumadil akhir 1445

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0064/FSP/A.1-VIII/1/1445H/2024 M tanggal 10 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURFITRIA ANUGRAH

No. Stambuk : 10564 1104020

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAIN SUTERA DI DESA PAKKANNA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Januari 2024 s/d 12 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 699/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Wajo
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3306/05/C.4-VIII/I/1445/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURFITRIA ANUGRAH
Nomor Pokok	: 105641104020
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAIN SUTERA DI DESA PAKKANNA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Januari s/d 12 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

		PTSPWJ IP1246331																								
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan Website : dpmptsp.wajokab.go.id , Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com																										
IZIN PENELITIAN / SURVEY NOMOR : 2975/IP/DPMPTSP/2024																										
Membaca	:	Surat Permohonan NURFITRIA ANUGRAH Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey																								
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan. 																								
Memperlihatkan	:	<ol style="list-style-type: none"> Surat dari FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Nomor : 3306/05/C.4-VIII/1445/2024 Tanggal 11 Januari 2024 Perihal IZIN PENELITIAN Rekomendasi Tim Teknis Nomor 03186/IP/TIM-TEKNIS/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey 																								
Menetapkan	:	Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>NURFITRIA ANUGRAH</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tanggal Lahir</td> <td>:</td> <td>Jalan Abbatangge , 31 Agustus 2001</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>ATAPANGE, Kecamatan Majauleng</td> </tr> <tr> <td>Perguruan Tinggi/Lembaga</td> <td>:</td> <td>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</td> </tr> <tr> <td>Jenjang Pendidikan</td> <td>:</td> <td>S1</td> </tr> <tr> <td>Judul Penelitian</td> <td>:</td> <td>STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAIN SUTERA DI DESA PAKKANNA DI DINAS PERINDUSTRIAN UMKM, DAN DESA</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Penelitian</td> <td>:</td> <td>PAKKANNA</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu Penelitian</td> <td>:</td> <td>15 Januari 2024 s/d 15 Februari 2024</td> </tr> </table>	Nama	:	NURFITRIA ANUGRAH	Tempat/Tanggal Lahir	:	Jalan Abbatangge , 31 Agustus 2001	Alamat	:	ATAPANGE, Kecamatan Majauleng	Perguruan Tinggi/Lembaga	:	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	Jenjang Pendidikan	:	S1	Judul Penelitian	:	STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAIN SUTERA DI DESA PAKKANNA DI DINAS PERINDUSTRIAN UMKM, DAN DESA	Lokasi Penelitian	:	PAKKANNA	Jangka Waktu Penelitian	:	15 Januari 2024 s/d 15 Februari 2024
Nama	:	NURFITRIA ANUGRAH																								
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jalan Abbatangge , 31 Agustus 2001																								
Alamat	:	ATAPANGE, Kecamatan Majauleng																								
Perguruan Tinggi/Lembaga	:	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR																								
Jenjang Pendidikan	:	S1																								
Judul Penelitian	:	STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAIN SUTERA DI DESA PAKKANNA DI DINAS PERINDUSTRIAN UMKM, DAN DESA																								
Lokasi Penelitian	:	PAKKANNA																								
Jangka Waktu Penelitian	:	15 Januari 2024 s/d 15 Februari 2024																								
Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat. 																										
		Ditetapkan di : Sengkang Pada Tanggal : 16 Januari 2024																								
		Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,   H. NARWIS, S.E., M.Si. Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA NIP : 196507151994031011																								
No. Reg : 4109/IP/DPMPTSP/2024 Retribusi : Rp.0.00																										



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

Jl. Bau Baharuddin No. 4 Telp. (0485) 21140, email: diskopumkm.wajo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.9/143/Disperindagkop&UKM

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Wajo, menerangkan bahwa :

Nama : **NURFITRIA ANUGRAH**
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 105641104020
 Program Studi : S.1 Ilmu Pemerintahan
 Fakultas / Universitas : Fisip / Universitas Muhammadiyah Makassar
 Lama Penelitian : 2 (Dua) Bulan
 Alamat : Jl. Abbatangge, Atapange Kec. Majauleng Kab. Wajo

Bahwa yang tersebut diatas **TELAH SELESAI** melaksanakan penelitian di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo dengan Judul : **STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAIN SUTERA DI DESA PAKKANNA**, dengan mamatuhi segala ketentuan yang telah disepakati.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Sengkang
 Pada Tanggal 21 Februari 2024

Kepala Bidang Perindustrian



MURAHIMAH DARWIS, SE. M. SI
 201001 1 012



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurfitriya Anugrah

Nim : 105641104020

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



S. Hum., M.I.P.
NIM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



Nurfitriah Anugrah lahir di Atapange, 31 Agustus 2001, merupakan anak ke 2 dari tiga bersaudara, buah hati dari Bapak Muhammad Ridwan, S.Pd dan Ibunda Hj. Suriani. Kami bertempat di Desa Atapange, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Penulis menempuh pendidikan pertama di SDN 170 Rumpiah dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Majauleng dan selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikannya di SMAN 2 Wajo selesai pada tahun 2020. Dengan dukungan dari kedua orang tua tercinta, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Berkat petunjuk dan rezeki dari Allah SWT. Dengan penuh semangat, doa dan dukungan dari orang tua, keluarga, sahabat dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan Program Strata Satu Ilmu Pemerintahan (S.IP) tepat pada hari Selasa 27 Februari 2024 dengan predikat yudisium cum laud. Penulis sangat bersyukur sehingga bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang. Penulis berharap dapat mengamalkan dengan sebaik baiknya untuk membahagiakan kedua orang tua. Akhir kata sekian dan terimakasih.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khaerat

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.